
**IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT SYSTEM DALAM UPAYA
PENINGKATAN CLEAN AND GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA**

**Kusuma Dewi Arum Sari¹
Wahyu Agus Winarno²**

Abstrak

Perkembangan paradigma kehidupan bernegara sejak reformasi 1998, membawa suatu tuntutan terciptanya *clean and good governance* di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kebijakan yang terarah salah satunya melalui pemanfaatan Teknologi Informasi berupa *e-government*. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pilihan pada masyarakat untuk mengakses informasi secara mudah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat sehingga dapat menjadi sarana *check and balances* kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan, perkembangan sistem *e-government* di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas hal ini belum memadai. Untuk lebih meningkatkan pengembangan *e-government* di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan *e-government* terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat. Bila dilakukan dengan serius hal tersebut dapat mendukung tercapainya keberhasilan implementasi *e-government* dan mampu memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya *clean and good governance* di Indonesia.

Kata kunci: *E-Government*, *clean and good governance*, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

1. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bernegara seperti halnya pada kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1998, paradigma yang berkembang dalam pemerintahan Indonesia adalah tuntutan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, maka timbullah istilah *Clean and good Governance* di Indonesia.

¹ Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

² Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Good Governance memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dan berwibawa serta bebas KKN dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat (Bappenas,2008). Guna mewujudkan *Clean and good Governance* terutama dari segi akuntabilitas dan transparansi publik, maka dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan ICT yaitu *e-government* atau Pemerintahan Elektronik. Susartono (2006) dalam penelitiannya yang berjudul *e-government* di Indonesia, menyimpulkan bahwa penyelenggaraan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

E-Government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*. Kebijakan dan strategi tersebut diatur dalam Inpres No.3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* di Seluruh Jajaran Pemerintah. Nurcahyati dan Daru (2008) pada Seminar Nasional Informatika yang berjudul Peran *E-Government* dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* bagi Masyarakat, menyimpulkan bahwa Sosialisasi *e-government* perlu dilakukan secara konsisten, kontinyu kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan *e-government*.

Realisasi pengembangan *e-government* di Indonesia menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografi, ekonomi, teknologi, politik, maupun budaya. Dalam proses implementasi, ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan implementasi *e-government* masih berjalan lambat dan tidak signifikan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan Negara. Kesenjangan antar daerah, dan adanya duplikasi *database* menjadikan data produk pemerintah cenderung kurang dipercaya. Sosiawan (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Tantangan dan hambatan dalam implementasi *e-government* di Indonesia, menyimpulkan bahwa implementasi *e-government* di Indonesia masih setengah jalan, sehingga diperlukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan *e-government*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan penulis adalah bagaimana perkembangan penerapan *e-government* di Indonesia dalam mewujudkan *clean and good governance* dan apa saja tantangan yang di hadapi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan *e-government*.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 E-Government

Istilah *e-government* berasal dari bahasa asing yang merupakan penyingkatan dari *electronic government* atau pemerintah elektronik. Ada beberapa definisi mengenai *e-government*, yaitu:

Menurut **World Bank Group** definisi *e- government* adalah

“e-government refers to the use by government agencies of information, technologies (such as wide area networks, internet, and mobile computing)

that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.”

(*e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *wide area networks*, internet, dan *computer mobile* yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, aparatur pemerintah).

United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan *e-government* :

“e-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.”

(*e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah).

Clay G. Wescott (Pejabat Senior *Asian Development Bank*), mendefinisikan:

E-government sebagai Penggunaan ICT untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Anne Mozes mendefinisikan *e-government* sebagai:

Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C, G2B, dan G2G (Fatah, 2009).

Di Indonesia pengertian *e-government* adalah

E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO).

2.1.1 Tujuan *E-Government*

Tujuan pengembangan *e-government* di Indonesia menurut Inpres No.3 Tahun 2003 adalah

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

2.1.2 Konsep E – Government

Secara umum terdapat 4 (empat) konsep interaksi antar pelaku dalam *e-government*, yaitu:

1. **G to C** (*Government to Citizens*),
Government dengan *Citizen* yaitu suatu hubungan antara pemerintah dengan rakyat sehingga adanya akses informasi yang dapat dimanfaatkan/diperoleh masyarakat untuk kepentingannya. Contoh aplikasi jenis ini : masyarakat bisa mengakses data/informasi dari BPS, masyarakat dapat mendaftar ke PTN melalui internet, masyarakat dapat mengetahui pengumuman hasil ujian melalui SMS dari ponsel masing-masing, dan lain-lain.
2. **G to G** (*Government to Governments*)
 Menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah. Yang dimaksud pemerintah dengan pemerintah adalah antara Pemerintah pusat dalam suatu negara dengan Pemerintah daerah. Contoh: Pelaporan, komunikasi antara pemerintah pusat di Jakarta dengan pemerintah daerah di Surabaya menggunakan fasilitas *on-line* (internet).
3. **G to B** (*Government to Business*)
Government to business yaitu relasi antara pemerintah dengan pelaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh relasi jenis ini adalah pebisnis dapat mengakses informasi, prosedur perizinan dari regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan kemudahan prosedur maka akan banyak investor yang menginvestasikan modalnya di Indonesia.
4. **G to E** (*Government to Employees*)
 Hubungan antara pemerintah dengan pegawai baik pegawai negeri maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan. Contoh : Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah, untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas SDM, penunjang proses mutasi, rotasi serta promosi seluruh karyawan pemerintahan. (Astuti, 2008)

Keempat konsep interaksi *e-government* memiliki tujuan masing-masing. Namun, secara umum tujuan dari keempatnya sama yaitu untuk menyediakan akses informasi, dan pelayanan secara efisien pada pihak lain baik antar pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan karyawan pemerintah daerah maupun dengan pelaku bisnis. (Siau dan Long, 2009).

2.1.3 Tahapan Pengembangan E-Government

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut (Inpres No.3 tahun 2003) :

- a. Tingkat 1 - **Persiapan** yang meliputi :
 1. Pembuatan situs informasi di setiap lembaga
 2. Penyiapan SDM
 3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, *Warnet*, *SME-Center*, dll.
 4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- b. Tingkat 2 - **Pematangan** yang meliputi :

1. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
2. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
- c. Tingkat 3 - **Pemantapan** yang meliputi :
 1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- d. Tingkat 4 - **Pemanfaatan** yang meliputi :
 1. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

2.1.4 Jenis Layanan E-Government

Banyak harapan akan tersedianya berbagai macam layanan untuk aplikasi *e-government* ini. Tetapi secara umum menurut Indrajit (2005) jenis layanan *e-government* dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, antara lain :

(1) Jenis layanan yang bertujuan untuk penyediaan informasi seperti visi dan misi pemerintah, berbagai peraturan perundang-undangan, prosedur pendirian usaha, berbagai data kependudukan, pertanian dan perdagangan. Untuk jenis layanan yang pertama ini, pembangunan aplikasi *e-government* sangat bertumpu pada penciptaan halaman *Web* yang menarik dan komunikatif. (2) Jenis layanan yang bersifat komunikasi interaktif dua arah, seperti konsultasi perpajakan, diskusi tentang rancangan undang-undang dan lain sebagainya. Untuk jenis layanan ini, maka aplikasi *e-government* perlu kelengkapan fasilitas seperti video konferensi, atau aplikasi *chatting* dan *email*. (3) Jenis layanan yang bersifat transaksi, seperti permohonan KTP, IMB, pembayaran wajib pajak, listrik, PBB, air, telepon secara *online*, sistem *e-procurement*. Dengan jenis layanan tersebut, maka aplikasi *e-government* juga harus dilengkapi dengan sistem informasi *on-line* yang mendukung pencatatan setiap transaksi yang terjadi.

2.1.5 Faktor-Faktor Penghambat dan Penentu Keberhasilan Penerapan E-Government

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan *e-government* di Indonesia diantaranya (Rahardjo, 2001) : (1) Kultur berbagi (*sharring*) informasi belum ada, (2) Kultur mendokumentasi belum lazim, (3) Langkanya SDM yang handal dibidang TI, (4) Infrastruktur yang belum memadai dan mahal, (5) Tempat akses informasi yang terbatas.

Menurut Retnowati (2008) faktor – faktor penentu keberhasilan penerapan *e-government* adalah: (1) Kebutuhan seperti apa yang saat ini menjadi prioritas utama dari masyarakat di negara atau di daerah terkait, (2) Infrastruktur telekomunikasi, (3) Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, (4) Kesiapan SDM di pemerintah, (5) Ketersediaan dana dan anggaran, (5) Ketersediaan perangkat hukum, (6) Perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur.

2.2 Clean Governance

Clean Governance atau Pemerintahan yang bersih adalah Pemerintah yang diisi oleh aparat yang jujur, dan bekerja sesuai dengan tugas yang diembannya, tidak melakukan praktek KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), bisa bertindak objektif, netral dan tidak diskriminatif (Bappenas, 2008). Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang bersih, tercermin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang

mengatur tentang Asas-asas Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun asas umum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah sebagai berikut : (a) Asas kepastian hukum, (b) Asas tertib penyelenggaraan negara, (c) Asas kepentingan umum, (d) Asas keterbukaan, (e) Asas proposionalitas, (f) Asas profesionalitas, (g) Asas akuntabilitas.

Clean Governance erat kaitannya dengan *Good Governance* karena keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari KKN.

2.3 Good Governance

Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, ataupun administrasi yang baik yang berlandas awal prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas guna mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat (Bappenas, 2008).

2.3.1 Manfaat Good Governance

Manfaat yang diperoleh dari *Good Governance* menurut Bappenas (2008) adalah:

- a. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- c. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi.
- d. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang – undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

2.3.2 Prinsip Good Governance

Prinsip – prinsip dasar *good governance* menurut (UNDP) adalah: (1) Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, (2) Tegaknya Supremasi hukum, (3) Transparansi pada seluruh proses pemerintahan, (4) Peduli pada *stakeholder*, (5) Berorientasi pada konsensus, (6) Kesetaraan, (7) Efektivitas dan efisiensi pada proses pemerintahan, (8) Adanya akuntabilitas, (9) Visi Strategis

Bappenas RI juga mengajukan 14 prinsip *good governance* yaitu: (1) Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan. (2) Tata pemerintahan yang bersifat terbuka dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan kebijakan. (3) Tata pemerintahan yang cepatt. (4) Tata pemerintahan yang akuntabel pada semua tahap kegiatan. (5) Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, terdiri dari aparat yang sesuai dengan kompetensi (kriteria jabatan dan mekanisme penempatan). (6) Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. (7) Tata pemerintahan yang terdesentralisasi. (8) Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. (9) Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. (10) Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. (11) Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. (12) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. (13) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar. (14) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup.

3. PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Perkembangan *E-Government* di Indonesia

Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan dimulai pada tahun 1992 ketika pada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda Tingkat II, istilah saat itu) menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui pemanfaatan komputer *stand alone*. Istilah *e-government* saat itu belum dikenal, istilah yang digunakan adalah komputerisasi yang berfungsi sebagai pengelolaan surat-menyurat.

Istilah *e-government* mulai muncul pada era tahun 2000, sejak tahun ini internet telah cukup banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan dunia usaha, namun belum banyak lembaga pemerintah yang memiliki situs *web*, bahkan di tingkat Departemen. Pada tahun 2001, melalui Inpres No. 6 Tahun 2001 mengenai Telematika. Secara formal *e-government* di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 saat diterbitkannya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung hukum bagi kebijakan di bidang *e-government*. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut perkembangan *e-government* di Indonesia melalui empat tingkatan yaitu tingkat persiapan, tingkat pematangan, tingkat pemantapan dan tingkat pemanfaatan.

Mengacu pada empat tingkatan pengembangan *e-government* tersebut, pada saat ini seberapa besar instansi-instansi pemerintah terutama yang berada di kawasan Indonesia bagian timur masih menduduki tahap pertama. Sehingga fakta bahwa terjadinya kesenjangan dalam pengembangan pada instansi pemerintah di kawasan Indonesia tak terelakkan lagi. Contohnya, kesenjangan yang terjadi antara situs Pemprov Jatim dengan Pemprov Papua. Pemprov Jatim melalui kota Surabaya telah meningkatkan peranan TIK dalam melayani kepentingan publik melalui aplikasi layanan e-Sapa Warga yang mempermudah warga Surabaya dalam membuat KTP. Selain itu, Pemerintah Surabaya menyebarkan CCTV di 300 lokasi dan mengembangkan GPS pada angkutan umum Surabaya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekitar (Warta Ekonomi).

Keadaan tersebut sangat berbeda dengan Pemprov Papua, dimana minimnya infrastruktur, minimnya SDM ahli, kurangnya aksesibilitas antar wilayah dan kota di Papua memperlambat implementasi *e-government* di seluruh wilayah Papua. Contohnya saja pada daerah Wamena dimana daerah ini masih cukup terisolir dari dunia luar, jarang terdapatnya aliran listrik dan jaringan internet, sering terjadinya pertengkaran antar suku dan minimnya sumber daya manusia yang terampil mengakibatkan terhambatnya pengembangan *e-government* di daerah ini.

Dengan keadaan diatas berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 sejumlah langkah-langkah yang diambil Pemerintah guna tercapainya keberhasilan *e-government*, yaitu:

- a. Rencana Legalisasi *Software* Pemerintah guna menekan angka pembajakan *software* di instansi pemerintah dan mendorong penggunaan *software* berbasis *open source*.
- b. *National Single Window* diterapkan untuk integrasi layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu yang lebih efisien dan prosesnya lebih cepat.
- c. *E-procurement* diharapkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menekan perilaku-perilaku KKN.

Berikut Tabel 3.1 Mengenai Perkembangan *e-government* di Beberapa Contoh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Republik Indonesia:

Kementerian dan LPND	Tahapan Pengembangan E-Government	Implikasi Layanan E-Government terhadap Clean and good Governance
Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.depkeu.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Koinfo, Bapem, LKPP dan Pemprov serta Pemda. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui SIMPEG tingkatkan informasi SDM yang akurat dan cepat. b. Melalui WISE meminimalisir tindakan pelanggaran dilingkungan Kemenkeu. c. Dengan <i>call center</i> tingkat partisipasi masyarakat. d. Melalui <i>e-procurement</i> proses pengadaan barang menjadi lebih transparan dan meminimalisir kasus pengadaan fiktif.
Kementerian Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.pu.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga lain (Koinfo, BPK, LKPP dan Pemprov serta Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui <i>e-procurement</i> tender proyek Kementerian PU lebih transparan. b. Melalui <i>e-recruitment</i> meningkatkan SDM yang kompeten. c. Dengan <i>e-monitoring</i> meminimalisir keterlambatan dan tingkatkan akurasi data pelaporan dari proyek-proyek Kementerian PU yang ada didaerah.
Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.deptan.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Koinfo, Beacukai, dan Pemprov serta Pemda. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. GAP mempermudah menelusuri komoditas hasil pertanian di daerah. b. e-perizinan mendorong dan mempermudah kemitraan dengan pelaku usaha c. <i>e-ekspor impor</i> mempermudah distribusi hasil pertanian ke luar negeri.
BPKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.bpkp.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Koinfo, BPK, Kemenkeu, dan Pemprov serta Pemda. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui DMS penyimpanan dan pengelolaan <i>database</i> lebih baik. b. RKT meningkatkan efektifitas dan efisiensi unit kerja BPKP c. Melalui BOS KITA termonitornya pelaksanaan rencana kerja oleh unit BPKP.

BPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.bpkp.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Koinfo, Kemendagri, Bakosurtanal, UKP4 dan Pemprov serta Pemda. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dengan SIMTANAS tercapainya integrasi dan pengawasan antara kantor pusat dan daerah. b. Peta <i>online</i> mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi peta pertanahan. c. Layanan SMS dapat meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat.
-----	---	---

Sumber : Warta Ekonomi dan Situs Web Kementerian dan LPND

Berikut Tabel 3.2 Mengenai perkembangan *e-government* pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia:

Pemerintah	Tahapan Pengembangan <i>E-Government</i>	Impikasi Layanan <i>E-Government</i> terhadap <i>Clean and good Governance</i>
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif yang menarik www.jakarta.go.id dan berisi kegiatan pemerintah. 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Koinfo, Kemendagri, LKPP, BP KBPKP dan Pemerintah daerah. 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Balai warga sebagai sarana partisipasi masyarakat. b. Melalui bank data adanya keterbukaan mengenai informasi terkait kebijakan public c. Melalui <i>e-procurement</i> tercapainya transparansi kegiatan lelang.
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.jogjaprov.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK jajaran pegawai. 3. Bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga (Koinfo, BPK, LKPP dan Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jogja bisnis meningkatkan kemitraan dengan pelaku bisnis b. Jogja sehat wadah informasi kesehatan dan lingkungan. c. <i>Fishery Bussiness Center</i> mudahkan transaksi pelelangan ikan. d. melalui <i>e-procurement</i> tercapainya transparansi tender proyek pemerintah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.jatimprov.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai. 3. Bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga (Koinfo, Kemendagri, Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui bank data adanya keterbukaan mengenai informasi kebijakan public b. Dengan <i>e-procurement</i> efisiensi anggaran hingga 10%. c. Melalui <i>e-Sapa Warga</i> terjalinnya hubungan lebih erat antara pemerintah dengan warga
Pemerintah Provinsi Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.baliprov.go.id 	<ol style="list-style-type: none"> a. SIMANTRI wujudkan adopsi teknologi pertanian di desa.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga lain (Kominfo, Kemendagri, LKPP, dan Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> b. SISKUM mempermudah akses informasi hukum. c. Bursakerja <i>online</i> tingkatkan penyerapan Tenaga Kerja. d. Dengan <i>e-procurement</i> meminimalisir tindakan lelang fiktif.
Pemerintah Provinsi Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.papua.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga lain (Kominfo, Kemendagri, LKPP dan Pemda). 4. Pengaplikasian beberapa layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui <i>e-procurement</i> mempermudah pelelangan dan lebih transparannya transaksi lelang. b. Melalui SIKUM dapat diaksesnya informasi mengenai peraturan dan hukum. c. Melalui SDALH terdapatnya informasi kekayaan SDA dan kondisi lingkungan hidup setempat.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.luwuutara.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo, Kemendagri, LKPP. 4. Pengaplikasian <i>e-procurement</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui <i>e-procurement</i> meningkatkan transparansi transaksi lelang guna meminimalisir tindakan korupsi.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.kutaitimur.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan Kominfo, Kemendagri, Pemprov. 4. Pengaplikasian SIMPEKAB 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui SIMPEKAB informasi dan layanan kepada masyarakat lebih terjamin. b. Melalui SIMPEG meningkatkan pelayanan pemberian informasi SDM yang akurat dan cepat.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.lombokbaratkab.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK. 3. Bekerjasama dengan Kominfo, Kemendagri, LKPP. 4. Pengaplikasian <i>e-procurement</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui <i>e-procurement</i> tercapainya transparansi transaksi lelang.
Pemerintah Kota Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.kotajambi.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK 3. Bekerjasama dengan Kominfo, Kemendagri, LKPP dan Pemprov. 4. Pengaplikasian <i>e-procurement</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui <i>e-procurement</i> meminimalisir terjadinya tender fiktif.
Pemerintah Kota Ambon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat situs interaktif www.ambon.go.id 2. Memberikan Pelatihan TIK kepada para pegawai dan staf. 3. Bekerjasama dengan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melalui <i>e-procurement</i> meningkatkan transparansi transaksi lelang dan meminimalisir tindakan korupsi dari lelang fiktif.

	Kominfo, Kemendagri, LKPP dan Pemprov. 4. Pengaplikasian beberapa layanan.	b. Melalui Layanan SMS meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
--	---	--

Sumber : Warta Ekonomi dan Situs Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berikut Tabel 3.3 yang menjelaskan mengenai *e-government* pada beberapa lembaga Pemerintahan:

Jenis	Implikasi <i>E-government</i> terhadap <i>clean and good governance</i>
Kementerian	Perkembangan <i>e-government</i> pada Kementerian di Indonesia telah memasuki tahap ke 3 yaitu pematapan. Perkembangan ini berperan penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, integrasi antar kementerian, sarana yang membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah guna tercapainya <i>clean and good governance</i> di Indonesia.
LPND	Tidak jauh berbeda dengan perkembangan <i>e-government</i> di Kementerian, pada LPND juga berada pada tahap pematapan. Dengan adanya <i>e-government</i> mampu meningkatkan efektivitas serta efisiensi antar lembaga, serta menjadi sarana pemberian informasi dan partisipasi bagi masyarakat. Juga sebagai sarana meminimalisir tindak korupsi.
Pemerintah Provinsi	Sebagian besar Pemprov di Indonesia telah memasuki tahap pematapan perkembangan <i>e-government</i> . Melalui Pemanfaatan <i>e-government</i> di Pemprov mampu meningkatkan pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat berbasis internet, dan dapat membuat masyarakat bertindak sebagai <i>sosial control</i> kebijakan pemerintah.
Pemkot atau Pemkab	Pemerintah Kota atau Kabupaten di Indonesia juga berusaha meningkatkan pemanfaatan <i>e-government</i> . Beberapa manfaat yang dirasakan yaitu meningkatkan layanan elektronik kepada masyarakat tanpa dibatasi jarak dan waktu, meningkatkan transparansi kebijakan yang dibuat pemerintah, meminimalisir tindakan korupsi terutama mengenai proses pengadaan didaerah-daerah.

Perkembangan *e-government* di Indonesia, berkaitan juga dengan perkembangan tingkat transparansi dan akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa, untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara dibentuklah suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (http://www.bpk.go.id/web/?page_id=10). Berdasarkan pasal 23 G, ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa, "BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi." Dengan demikian, kedudukan maupun peranan BPK dalam mewujudkan transparansi dan menciptakan *clean and good governance* di Indonesia menjadi lebih jelas dan kokoh. Sehingga tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah untuk memelihara transparansi guna menciptakan *clean and good governance* baik dari segi proses, sistem maupun kesesuaian dengan perangkat peraturan yang berlaku. Sehingga, elemen pokok transparansi tersebut berupa integritas atau kebenaran informasi laporan keuangan Negara (<http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/03.pdf>).

Guna terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Mengutip pendapat Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono, M.Ec, yang menyatakan “ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah *good governance* tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat *good governance*”. (<http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?id=358>). Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dibutuhkan peran aktif BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atas laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan beserta opini audit yang bersifat independen, objektif, adil, dan konstruktif dan diikuti dengan saran-saran perbaikan atas temuan-temuan kekurangan maupun penyimpangan yang ada. (<http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/03.pdf>).

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 pada pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa opini audit yang dikeluarkan oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan penjelasan tersebut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ditunjukkan berdasarkan opini audit yang dilakukan oleh BPK merupakan gambaran transparansi pada Pemerintah Indonesia. Pada Semester 1 tahun 2011, BPK telah memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010. Opini tersebut sama dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009. Sementara itu, sebelum tahun 2009 selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau *disclaimer opinion* atas LKPP. (<http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011-sem1.pdf>).

Berikut Opini audit yang dilakukan oleh BPK pada beberapa Kementerian dan Lembaga maupun pada Pemerintah Daerah mulai tahun 2006 sampai 2010:

Tabel 3.4 Daftar Opini Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga tahun 2006 - 2010

No	Entitas Kementerian dan Lembaga	Opini Audit BPK Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kementerian Keuangan	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
2	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
3	Kementerian Pertanian	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
4	BPKP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
5	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP

Sumber : <http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011-sem1.pdf>

Tabel 3.5 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006-2010

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Audit BPK Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
2	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	WDP	TW	WDP	WDP	WTP
4	Pemerintah Provinsi Bali	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
5	Pemerintah Provinsi Papua	TW	WDP	WDP	WDP	TMP
6	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	
7	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	TMP	TMP	TMP	TMP	
8	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Pemerintah Kota Jambi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Pemerintah Kota Ambon	TMP	WDP	TMP	TMP	

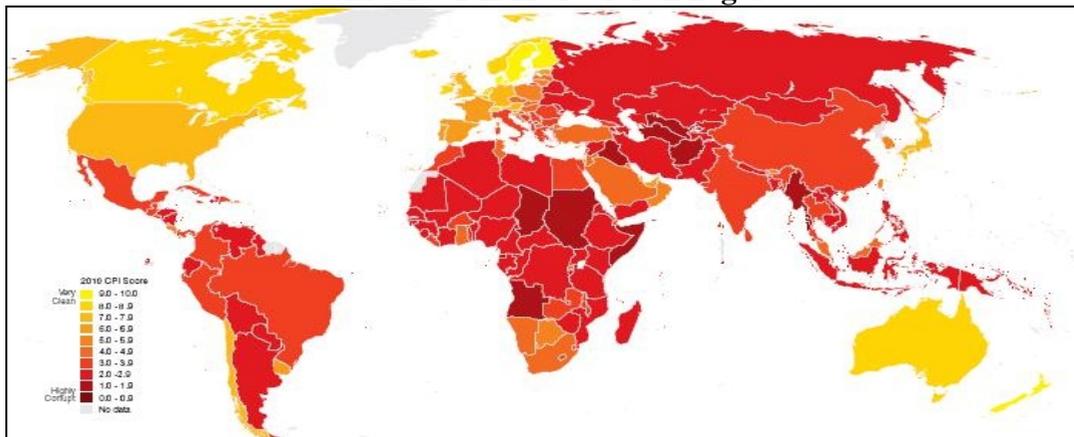
Sumber : <http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011-sem1.pdf>

Keterangan :

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*unqualified opinion with modified wording*)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
TW : Opini Tidak Wajar (*adverse Opinion*)
TMP : Opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)

Selain berdasarkan hasil audit dari BPK *clean and good governance* dapat ditunjukkan berdasarkan tingkat korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Gambar di bawah menunjukkan tingkat IPK dari 0-10 di seluruh negara, dimana dimulai dari warna kuning untuk yang index korupsinya paling rendah (*very clean*) dengan nilai 9-10 lalu terus turun menjadi warna merah tua dengan nilai 0 - 0.9 (*highly corrupt*).

Gambar 3.1 IPK di seluruh negara



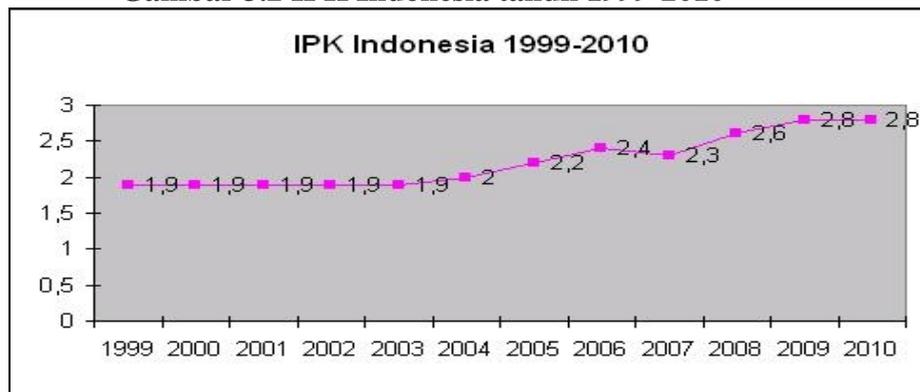
3.2 IPK Indonesia

Sejak tahun 1999 - 2003 nilai IPK Indonesia berkisar 1,9 (skala 0-10, dimana nilai 0 mengindikasikan tingkat persepsi terhadap korupsi yang tinggi dan 10 mengindikasikan tingkat persepsi terhadap korupsi yang rendah) sehingga reformasi belum menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Lalu pada tahun 2004, Indonesia mengalami peningkatan IPK menjadi 2,0 dan tahun 2005 menjadi 2,2 peningkatan ini tidak signifikan namun meningkat cukup lumayan sejak tahun 1999 – 2003. Indonesia bersama dengan Azerbaijan, Cameron, Ethiopia, Iraq, Liberia dan Uzbekistan merupakan negara-negara nomor enam terkorup dari 158 negara yang disurvei. (<http://hukum.kompasiana.com/2011/05/17/perjalanan-ipk-indonesia-1999-2010/>)

Lalu pada tahun 2006 membaik menjadi 2,4 namun Indonesia masih berada dalam kelompok negara yang amat korup dengan indeks di bawah 3. Setahun kemudian, pada tahun 2007 *Transparency International* menunjukkan Indonesia berada di urutan 143 dengan nilai 2,3. Skor Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,1 dibandingkan IPK tahun 2006. Dan pada tahun 2008, menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu berada di urutan ke-126 dengan skor 2,6 atau naik 0,3 dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus korupsi.

Lanjut ke tahun 2009, IPK Indonesia bergerak naik menjadi 2,8. Namun skor ini tidak terlalu signifikan dan masih dalam wilayah negara yang masih terpersepsikan korupsi. Kenaikan persepsi masyarakat ini merupakan salah satu keberhasilan dua institusi yaitu KPK yang waktu itu dapat menyelesaikan konflik dengan Polri dan reformasi departemen keuangan. Pada tahun ini posisi Indonesia berada di urutan 111 untuk CPI dunia bersama negara Algeria, Djibouti, Egypt, Kiribati, Mali, Sao Tome and Principe, Solomon Islands. Lalu di Tahun 2010, Indonesia masih bertahan dengan IPK 2,8 namun dalam posisi negara di dunia, Indonesia naik ke urutan 110 bersama Benin, Bolivia, Gabon, Kosovo dan Solomon Islands. Berdasarkan laporan tahun 2010 ini, kita masih kalah oleh beberapa negara ASEAN seperti Singapore (9,3), Brunei (5,5), Malaysia (4,4) dan Thailand (3,5). (<http://hukum.kompasiana.com/2011/05/17/perjalanan-ipk-indonesia-1999-2010/>)

Gambar 3.2 IPK Indonesia tahun 1999-2010



Sumber : www.ti.or.id diolah oleh www.hukum.kompasiana.com

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan *e-government* di Indonesia juga berkaitan dengan perkembangan *clean and good governance* di Indonesia.

3.3 Hasil Survei United National Development Programme

Perkembangan *e-government* di Indonesia dari tahun ketahun sudah mengalami peningkatan. Pada saat ini seluruh pemerintah pusat dan daerah, termasuk lembaga-lembaga *ad-hock* telah memiliki situs web (600 Kementerian/Lembaga/Pemda). Meskipun sudah mengalami peningkatan tetap saja *e-government* di Indonesia masih jauh dibawah Malaysia. Berdasarkan *World E-Government Development Ranking* dengan indikator penilaian seperti keterjangkauan informasi, kemudahan mengakses, kemampuan memberikan pelayanan dan partisipasi masyarakat, peringkat Indonesia pada tahun 2010 menduduki peringkat ke 109, sedangkan Malaysia menduduki peringkat 32 dunia.

Berikut Tabel 3.6 hasil survei UNDP pada tahun 2010:

Country	E-Government Development Index 2010	World E-Government Development Ranking 2010
Republic of Korea	0.8785	1
Singapore	0.7476	11
New Zealand	0.7312	14
Malaysia	0.6101	32
Philippines	0.4637	78
Indonesia	0.4026	109

Sumber : E-Government Survey 2010, UNDP

Dengan adanya hasil survei yang dilakukan oleh UNDP menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-government* sebagai bentuk baru '*Government*' dirasakan belum maksimal. Proses bisnis yang mestinya bisa diefektifkan melalui fungsi TIK, belum diorganisasikan melalui suatu *Business Process Re-engineering* (BPR) yang baik. Oleh karenanya pada tahun 2011, Kemendagri melalui Mendagri memberikan suatu terobosan baru dalam mengurus KTP secara elektronik atau yang disebut e-KTP, ini bertujuan memberikan pelayanan yang mudah dan murah bagi masyarakat guna tercapainya *clean and good governance* di Indonesia.

3.4 Contoh Implementasi E-government

Guna tercapainya konsep *clean and good governance* beberapa negara termasuk Indonesia memanfaatkan teknologi dan informasi yaitu dengan mengembangkan *e-government*.

Salah satu contoh penerapan *e-government* yang telah dilakukan pemerintah Indonesia beberapa tahun belakangan ini adalah melalui *e-procurement*. *E-procurement* merupakan salah satu layanan *e-government* yang merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik, berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan *e-procurement* di Indonesia adalah:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

E-procurement di Indonesia di fasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Lembaga ini juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007. LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan data dari Warta Ekonomi, pengadaan barang dan jasa yang telah ditransaksikan melalui sistem *e-procurement* terus meningkat. Hingga tahun 2011 telah terjadi peningkatan menjadi 11.800-an paket dengan nilai transaksi Rp 19,8 Trilyun dengan efisiensi Rp 2,7 Trilyun, padahal pada tahun 2010 paket yang ditransaksikan baru sebesar 6.200 paket dengan nilai transaksi Rp 13 Trilyun dengan efisiensi Rp 1,3 Trilyun.

Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010, semua instansi-instansi pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan *e-procurement* pada tahun 2012. Melalui *e-procurement* telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah sebesar 11% pada tahun 2010, dan berhasil menghemat 14%. Contoh lainnya adalah pada Pemerintah kota Surabaya dimana memperoleh efisiensi anggaran hingga 10% karena adanya standarisasi harga dan analisa standar belanja, efisiensi terhadap alokasi yang telah ditetapkan hingga 25%, terencanaanya proses pengadaan barang/jasa, dan pelaporan yang jelas atas kegiatan dan penyerapan anggaran dapat diakses oleh pimpinan dan masyarakat secara terbuka dan kapan saja melalui internet. Dari sisi penyedia barang dan jasa, implementasi *e-procurement* kota Surabaya mampu memberikan kesempatan merata dan lebih luas kepada pengusaha kecil menengah hingga 96,4% perusahaan lokal (Warta Ekonomi)

Dengan adanya *e-procurement* diharapkan dapat terus membantu pemerintah dalam meningkatkan keefektifan, efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan tender dan guna mendorong tercapainya *clean and good governance* dimasa mendatang.

3.5 Tantangan *E-government*

Pemanfaatan *e-government* di Indonesia terus di kembangkan. Hal ini membuktikan bahwa masa depan layanan *e-government* sangatlah terang tetapi tetap memiliki beberapa tantangan, diantaranya:

- a. Pengembangan Infrastruktur yang merata

Dengan kondisi geografis di Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah terpencil, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan infrastuktur baik TIK, internet maupun aliran listrik di seluruh pelosok Indonesia.

- b. Terdapatnya dukungan dari lembaga perwakilan rakyat
Meski sebagai perwakilan rakyat, kenyataannya DPR cenderung sering tarik ulur dan mempersulit dalam pengesahan Undang-Undang mengenai pengembangan *e-government* di Indonesia. Padahal yang kita tahu bahwa dukungan dari lembaga seperti DPR sangat dibutuhkan dalam tercapainya kesuksesan *e-government* di Indonesia.
- c. Tercapainya keberhasilan dalam penerapan *e-government*
Dari segi ekonomi, pengembangan *e-government* di suatu negara termasuk Indonesia membutuhkan materi yang tidak sedikit. Oleh karenanya, materi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.
- d. Pemberian penghargaan dan fasilitas yang memadai bagi para ahli
Indonesia memiliki banyak SDM yang ahli dalam bidang teknologi, namun kebanyakan menetap di luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah perlu lebih menghargai dan memberikan fasilitas bagi para ahli, guna meningkatkan perkembangan *e-government* di Indonesia. Selain itu memberikan pelatihan pembelajaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dan *e-government* bagi SDM yang ada di Indonesia.
- e. Peningkatan kultur berbagi (*sharing*) di Indonesia
Kultur berbagi (*sharing*) informasi pada masyarakat di Indonesia masihlah kurang, untuk meningkatkannya dibutuhkan peran pemerintah dalam mensosialisasikan situs website pemerintah kepada masyarakat yang berfungsi sebagai sarana *sharing* guna meningkatkan *feedback* antara pemerintah dengan masyarakat .
- f. Terwujudnya rasa aman dalam pemanfaatan internet
Banyak masyarakat yang merasa pemanfaatan layanan secara elektronik kurang aman dan nyaman, untuk itu sebaiknya pemerintah terus memberikan sistem operasi internet dan layanan elektronik yang dijamin keamanannya dan tidak melanggar hak privasi pengguna.

4. PENUTUP

E-Government merupakan suatu sistem TI yang dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakat, untuk mendapatkan kemudahan mengakses informasi dan pelayanan publik guna mewujudkan *clean and good governance* pada suatu negara.

Perkembangan sistem *e-government* di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas masih belum memadai dikarenakan implementasi *e-government* belum merata pada seluruh wilayah dan masih berfungsi sebagai penyedia informasi statik saja. Guna meningkatkan pengembangan *e-government* di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukannya komitmen pemerintah dalam melakukan penyempurnaan pengembangan *e-government* terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun kepada masyarakat.

Saat ini, salah satu contoh implementasi *e-government* yang telah diaplikasikan di Indonesia adalah *e-procurement*. Melalui *e-procurement*, pemerintah berharap dapat menjadi sistem pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan terbuka guna memperbaiki sistem pengadaan secara manual.

E-government merupakan alat pendukung tercapainya *clean and good governance*, karena Indonesia masih baru mengimplementasikan *e-government* dan belum berkembang cepat maka *clean and good governance* di Indonesia belum tercapai. Namun tidak menutup kemungkinan pada masa mendatang pengembangan implementasi *e-government* Indonesia akan berhasil.

Penelitian ini hanya meneliti perkembangan dan contoh pengimplementasian *e-government* pada Pemerintah Indonesia dengan mengambil contoh pada beberapa kementerian dan pemerintah daerah berdasarkan pulau. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan diharapkan dapat meneliti lebih mendalam mengenai *e-government* pada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

Pemanfaatan akan sistem *e-government* di Indonesia sangat dibutuhkan, maka diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan *e-government* melalui penyempurnaan konsep dan strategi guna meningkatkan *pengembangan e-government* di seluruh pelosok negeri. Bila dilakukan lebih serius dan adanya komitmen dari pemerintah maka pelaksanaan *e-government* pada gilirannya akan berhasil diimplementasikan dan mampu memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya *good governance* dan *clean governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Djunaedi, Achmad. 2002. "Integrasi *e-Government*: Tantangan, Kebijakan dan Implementasi". Jakarta: *Seminar Pelayanan Publik dan E-government*, Bappenas, 19 Desember 2008.
- Fatah, U. 2009. *Definisi dan Manfaat Utama E-Government*. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/definisi-dan-manfaat-utama_e-government/ [30 Oktober 2011]
- Hartono, Dwiwarso, Mulyanto Edy. 2010. *Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web*. Jurnal Teknologi Informasi Volume 6 No.1
<http://hukum.kompasiana.com/2011/05/17/perjalanan-ipk-indonesia-1999-2010/>
<http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/03.pdf>
<http://www.bpk.go.id/web/files/2011/10/IHPS2011-sem1.pdf>
<http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?id=358>
- Indrajit, Richardus E., 2002, *Electronic Government*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Indrajit, Richardus E., 2005, *Electronic Government*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Inpres No.3 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia
- Inpres No.5 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia
- Inpres No.5 Tahun 2004. Pemerintah Republik Indonesia
- Inpres No.6 Tahun 2001. Pemerintah Republik Indonesia
- Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Pemerintah Republik Indonesia

-
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. *Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet*. <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/kegagalan-penerapan-egov.pdf> [31 Oktober 2011].
- Nurchayati Dewi & Retnowati Daru. 2008. Peranan *e-government* dalam rangka mewujudkan *Good governance* bagi masyarakat. Seminar Nasional Informatika. Yogyakarta
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006. Pemerintah Republik Indonesia
- Satriya, Eddy. 2006. *Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia* Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia. 3-4 Mei 2006, Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung.
- Siau, K., dan Long, Y. 2009. *Factors impacting e-government development*. *Journal of computer information system*. Fall
- Sosiawan, Edwi Arief. 2004. Tantangan dan Hambatan Implementasi E-government di Indonesia. <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/Tantangan%20egov.pdf> [31 Oktober 2011]
- Susartono. 2006. *E-Government di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik UNS, Volume 2 No.1 April 2006.
- Undang-Undang No.15 Tahun 2004. Republik Indonesia
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999. Republik Indonesia
- United Nations. 2010. *E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis*, Department of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management, United Nations, New York. http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm [30 Oktober 2011]
- Warta Ekonomi, 2011
- Warta Pengawasan BPKP, 2011